

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN PATI

Oleh:

Nikmatul Nur Jannah

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di luar negeri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penempatan TKI asal Kabupaten Pati yang bekerja di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri di Kabupaten Pati serta mendeskripsikan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang dijalankan, terdapat permasalahan terkait pendaftaran, pelaporan, dan layanan data dan informasi TKI. Faktor yang dianggap menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri di Kabupaten Pati yaitu mengenai sasaran kebijakan, sumber daya, dan kondisi sosial dari TKI di Kabupaten Pati.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Sasaran Kebijakan, Sumber Daya Pelaksana, Kondisi Sosial TKI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri, serta meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemasukan devisa negara yang diperoleh dari TKI yang bekerja di luar negeri. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk mendukung terciptanya rasa aman dan terlindunginya nasib TKI di luar negeri. Kenyataan implementasi kebijakan penempatan TKI di Kabupaten Pati, masih belum berjalan dengan maksimal. Permasalahan yang pertama terkait implementasi

kebijakan penempatan TKI di Kabupaten Pati yaitu masalah seleksi. Beberapa dokumen yang dibawa oleh Calon TKI terkadang ada yang tidak sama dengan dokumen aslinya. Contohnya: mempunyai paspor yang berbeda dengan dokumen paspor yang lama. Masalah administratif TKI seperti perbedaan tanggal lahir TKI antara di ijazah dengan di e-KTP; nama orang tua TKI di ijazah dan e-KTP berbeda; dan lain-lain. Permasalahan yang kedua adalah masalah pelaporan. Pihak PPTKIS Cabang di Kabupaten Pati kurang disiplin dalam melaporkan laporan penerbangan (AN05) kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati. Permasalahan yang ketiga adalah masalah layanan data dan informasi TKI. Pada saat melakukan proses layanan data dan informasi TKI secara *online* terkadang mengalami hambatan server/jaringan internet dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) di Jakarta yang tidak terkoneksi dengan sistem komputerisasi tenaga kerja

luar negeri (siskotkn). Hambatan layanan data dan informasi TKI secara *online* meliputi layanan yang memuat tentang identitas TKI meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan pas photo; nomor paspor; nama dan alamat PPTKIS yang menempatkan TKI; nama dan alamat mitra usaha dan atau pengguna; nomor perjanjian penempatan; nomor perjanjian kerja; tanggal keberangkatan; dan kepesertaan asuransi TKI. Peneliti memutuskan memilih tempat kegiatan penelitian di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati. Hal tersebut dilandasi karena Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati sebagai salah satu instansi ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten/Kota yang mengurus masalah implementasi kebijakan penempatan TKI di Luar Negeri khususnya di Kabupaten Pati. Peneliti memutuskan memberi judul skripsi **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN PATI.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun perumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati? dan apa saja faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan kebijakan

penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

a. Menurut Chandler & Plano (Dalam Harbani Pasolong, 2014:7) mendefinisikan administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*artandscience*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

b. Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W. Koenig (Dalam HarbaniPasolong, 2014:7) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

c. Menurut Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (Dalam Harbani Pasolong, 2014:8) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) suatu kerjasama kelompok dalam

lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan serta pemerintahan mereka, (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

d. Menurut Dwight Waldo (Dalam Harbani Pasolong, 2014:8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

e. Menurut David H. Rosenbloom (Dalam Harbani Pasolong, 2014:8) mendefinisikan administrasi publik adalah pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan

pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh lembaga baik itu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik dan mencapai kepuasan publik.

2. Kebijakan Publik

Irfan Islamy (Dalam Sri Suwitri, 2011:9) telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik seperti pendapat Thomas R.Dye, James Anderson, David Easton, George C.Edwards, dan Ira Sharkansky. Beberapa pandangan ilmuwan mengenai pengertian kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah:

Thomas R.Dye (Dalam Sri Suwitri, 2011:9) mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu”. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

James Anderson (Dalam Sri Suwitri,2011:9): “kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.”

b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah:

Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan (Dalam Sri Suwitri, 2011:10): “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”.

c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program

program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan:

James E. Anderson (Dalam Sri Suwitri, 2011:10) : “kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.”

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat/publik.

3. Implementasi Kebijakan

a. Menurut Ripley dan Franklin (Dalam Budi Winarno, 2012: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

b. Menurut Grindle (Dalam Budi Winarno, 2012: 149) berpendapat bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

c. Menurut van Meter dan van Horn (Dalam Budi Winarno, 2012: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan oleh beberapa ahli yang telah dipaparkan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu dari serangkaian proses kebijakan publik, dimana implementasi merupakan proses pelaksanaan program dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan program ini dilakukan setelah adanya pengesahan dari sebuah kebijakan, dan merupakan proses yang tidak kalah pentingnya dengan proses lainnya di dalam kebijakan publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penempatan TKI di Luar Negeri di Kabupaten Pati yang Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

1. Pendaftaran

Proses pendaftaran TKI yang sesuai dengan prosedur yaitu calon TKI yang didampingi oleh pihak PPTKIS

yang merekrut datang ke dinas dengan membawa surat kelengkapan yaitu e-KTP, KK, ijazah, akte kelahiran, surat izin ortu/wali yang sudah mendapat stempel dari Kepala Desa dan diketahui camat, surat keterangan sehat, dan kartu AK/1. Dokumen-dokumen TKI tersebut datanya akan diinput di sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (siskotkln). Dalam proses pendaftaran TKI masih ada beberapa TKI yang tidak melengkapi dan menyesuaikan dokumen-dokumen yang disyaratkan sehingga dalam proses pendaftaran ini masih belum berjalan secara maksimal.

2. Seleksi

Proses seleksi diawali dengan calon TKI bersama dengan PPTKIS yang merekrut datang ke Dinas dengan membawa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan diantaranya e-KTP, KK, akte kelahiran, ijazah, surat izin dari ortu/wali, surat keterangan sehat, kartu AK/1. Dokumen-dokumen tersebut akan dicek kesesuaiannya. Calon TKI yang datang ke Dinas pada saat melakukan proses seleksi nantinya juga akan diinterview

dengan membawa kelengkapan dokumen yang disyaratkan dan apabila ada dokumen-dokumen yang belum lengkap maka tidak diloloskan. Dalam proses seleksi TKI masih ditemui beberapa TKI yang belum membawa kelengkapan dan menyesuaikan dokumen-dokumen yang disyaratkan.

3. Koordinasi Pelayanan Penempatan TKI di Kabupaten Pati

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dalam melaksanakan koordinasi pelayanan penempatan TKI bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Kementerian di Jakarta mengenai Surat Ijin Pengerahan (SIP), koordinasi dengan BP3TKI mengenai pendaftaran, rekrutmen, dan seleksi CTKI Kab.Pati, kasus-kasus yang menimpa TKI, sosialisasi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) ke PPTKIS di Kab.Pati yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati, kemudian koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dengan BNP2TKI yang ada di Jakarta tentang rekap data jumlah TKI, jumlah penempatan TKI. Pelaksanaan koordinasi pelayanan

penempatan TKI di Kabupaten Pati yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kabupaten Pati sudah baik dan tidak ada hambatan.

4. Layanan Data dan Informasi TKI

Proses layanan data dan informasi TKI secara *online* menggunakan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (siskotkln). Layanan data dan informasi TKI di Kabupaten Pati masih belum dapat berjalan secara maksimal karena masih dijumpai beberapa hambatan server/jaringan ketika melakukan proses penginputan biodata TKI.

5. Pelaporan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati melaksanakan tahap pelaporan yang meliputi pelayanan penempatan TKI, penyelesaian permasalahan TKI, dan pemberian peringatan tertulis kepada PPTKIS sesuai dengan Permenaker No.22 Tahun 2014.

6. Koordinasi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dalam melaksanakan proses koordinasi contohnya ada undangan dari BP3TKI yang ada di Semarang untuk melaksanakan rapat koordinasi

dan evaluasi dalam hal sistem pelayanan siskotkln di Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota apakah ada kendala/tidak. Dalam melaksanakan proses koordinasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati sudah melaksanakannya dengan cukup baik dan maksimal.

B. Faktor Penghambat dan Pendorong yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penempatan TKI di Luar Negeri di Kabupaten Pati

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ada sebagian sasaran kebijakan yaitu TKI di Kab.Pati yang belum semua ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati. Contohnya masih ada beberapa TKI yang belum melengkapi dan menyesuaikan dokumen-dokumen

yang disyaratkan dalam proses pendaftaran dan seleksi TKI.

2. Sumberdaya

Jumlah pegawai yang masih kurang banyak menjadi keluhan dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati karena merasa beban kerja masih terlalu banyak untuk dipegang per individu dengan komposisi pegawai yang ada sekarang ini. Dalam pengerjaan teknis, pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik. Anggaran yang berasal dari APBD dan APBN untuk pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati ini dapat dibilang belum mencukupi. Fasilitas yang masih dirasakan kurang oleh Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati yaitu pada kurang tersedianya driver/sopir untuk mengantar ke tempat tujuan apabila ada TKI yang bermasalah, dan masalah printer yang rusak untuk pelayanan TKI.

3. Hubungan antar Organisasi

Hubungan yang dimiliki antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dengan

organisasi lain antara lain contohnya dengan BP3TKI sudah baik dan dalam 1 tahun sering mendapat undangan dari BP3TKI di Semarang sampai 5 kali untuk rapat koordinasi diantaranya membahahas tentang pelayanan siskotkln di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, kemudian masalah rekrutmen, seleksi TKI, dan lain-lain. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dengan pihak swasta yaitu PT. Dewi Pengayom Bangsa meliputi kerjasama dalam bentuk rekrutmen TKI, seleksi TKI, serta laporan penerbangan (AN05) yang laporannya harus disampaikan oleh PT.Dewi Pengayom Bangsa ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati setiap bulannya semuanya sudah berjalan dengan baik. Pada akhirnya, fenomena hubungan antar organisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dengan sesama organisasi pemerintah dapat dinilai sebagai faktor pendorong kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dapat menjadi faktor pendukung kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati . Hal ini dibuktikan dari proporsionalnya struktur birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dilakukan dengan tujuan agar kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati ini dapat dilaksanakan secara optimal.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati yang dilaksanakan di Kabupaten Pati. Hal ini dibuktikan dari pengaruh partisipasi TKI yang sangat besar dalam rangka mensukseskan kebijakan ini.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati . Hal ini dibuktikan oleh Dinas Tenaga Kabupaten Pati yang selalu berupaya meningkatkan

pelayanan yang bersih, transparan, cepat, bebas dari pungutan liar atau pemerasan . Selain itu, pemahaman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati tentang kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati sesuai dengan Permenaker No.22 Tahun 2014 juga sudah cukup memahami.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati yakni mengenai proses pendaftaran, seleksi, dan layanan data dan informasi TKI. Sedangkan untuk proses koordinasi pelayanan penempatan TKI di Kabupaten Pati, pelaporan, dan koordinasi sudah berjalan dengan

baik dan sesuai dengan Permenaker No.22 Tahun 2014.

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati yaitu sasaran kebijakan, sumberdaya dan kondisi sosial dari TKI di Kabupaten Pati.

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati, yaitu karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi implementor.

2. Saran

a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati harus memberikan sosialisasi secara merata dan mendalam tentang kebijakan penempatan TKI di luar negeri agar seluruh TKI dapat mengetahui adanya kebijakan ini dan memahami dengan benar tanggung jawab yang dimiliki oleh TKI.

b. Penambahan jumlah driver/sopir untuk mengantar pegawai di Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pati ke tempat tujuan apabila ada TKI yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia

Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hariani, Dyah. 2013. *Buku Ajar Azas-Azas Manajemen*. Semarang: UPT UNDIP Press.

Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A.G. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal Penelitian:

Syaadah, Nilatus. Oktober 2014. "Analisis Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*. Vol 2No.1, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>

=267428&val=6772&title=A
NALISIS%20DAMPAK%20
PERTAMBAHAN%20PEND
UDUK%20TERHADAP%20
PENYERAPAN%20ANGKA
TAN%20KERJA, diakses
tanggal 30 Maret 2017 pukul
19.35 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar
Negeri.

Website

[https://www.bps.go.id/dynamictable/
2015/09/07/842/kepadatan-
penduduk-menurut-provinsi-
2000-2015.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/842/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi-2000-2015.html), diakses
tanggal 20 Januari 2018
pukul 07.50 WIB.

[http://www.bnp2tki.go.id/uploads/dat
a/data_17-01-
2018_080337_Laporan_Peng
olahan_Data_BNP2TKI_201
7_1.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf), diakses tanggal 20
Januari 2018 pukul 08.00
WIB.

